

Jakarta Bebas Banjir 2015 (?)

Judul itu saya kutip dari pernyataan salah seorang calon gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 pada sebuah diskusi di televisi swasta. Bersama pasangan gubernur lainnya, calon ini dengan penuh keyakinan menyatakan Jakarta akan bebas banjir selama tiga tahun kalau ia menjadi gubernur. Calon ini juga siap mundur bila selama tiga tahun programnya tidak berhasil.

Tentunya banyak lagi program para calon gubernur dan wakil gubernur bila mereka memimpin Jakarta. Ada yang bilang siap untuk menghilangkan kemacetan lalu lintas dan berbagai program yang akan mereka sodorkan pada Pemilihan DKI, 11 Juli mendatang. Apa yang mereka programkan ini sah-sah saja meski hasilnya masih kita tunggu.

Tapi, banjir di Ibu Kota sudah terjadi sejak lama dan selalu memusingkan para wali kota dan gubernur. Mulai dari Wali Kota Suwiryo dan Sudiro serta gubernur sejak zaman Sumarno sampai Fauzi Bowo. Banjir juga membebani para gubernur jenderal. Mulai JP Coen sampai AWL Tjarda van Starckenborgh gagal menjinakkan Batavia meski banjir pada masa itu tidak se dahsyat sekarang.

Pada masa kolonial, ada yang menyalahkan pendiri Kota Batavia memilih rawa-rawa. Kalau saja ia bijaksana

dan memilih tempat yang lebih tinggi, bencana banjir bisa dikurangi. Karena itu, Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) kemudian memindahkan pusat kota ke arah selatan yang dinamakan Weltevreden di sekitar Gambir dan Lapangan Banteng.

Gubernur Ali Sadikin yang ketika memimpin kota yang berpenduduk sekitar tiga juta jiwa ini menyatakan, "Bahaya banjir di Jakarta, begitulah kami berpendapat selama masa saya jadi gubernur (1966-1977), tidak bisa dihindarkan sampai kapan pun. Selama kita belum menjadikan sistem drainase yang sempurna. Untuk mengatasinya, biayanya mahal—terlalu mahal—sekitar 800 juta dolar AS."

Tentu saja nilai kurs setengah abad lalu tidak setinggi sekarang sekitar Rp 9.200 per dolar AS. Tapi, jangan membandingkan banjir sekarang ini dengan bencana yang sama pada masa kolonial. Kala itu, sungai-sungai masih dalam, lebar, dan bantaranya belum seperti sekarang yang menjadi tempat tinggal warga.

Ada calon gubernur yang bertekad tidak mau melakukan pengusuran akan membangun rumah-rumah susun untuk mereka. Sejauh ini, mereka menolak dipindahkan dengan alasan kepentingan usahanya.

Pada 1895, pemerintah kolonial

Hindia Belanda pernah merancang *grand design* untuk menanggulangi banjir di Batavia. Belanda sadar Batavia merupakan dataran rendah yang berpotensi terlanda bencana banjir karena daerahnya memang berawa-rawa dan terdapat situ (danau kecil).

Grand design ini mencakup pembangunan secara menyeluruh dari daerah hulu di Puncak hingga daerah pantai. Di Puncak dan sekitarnya, tahun lalu saja pembangunan vila tidak berizin hampir dua kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Tidak heran kalau hujan di kawasan Puncak akan mengakibatkan Jakarta mengalami kebanjiran karena hilangnya daerah resapan air.

Kembali ke masa kolonial, banjir besar pernah terjadi di Jakarta pada 1932. Banjir yang terjadi 9 dan 10 Januari 1932 disebabkan oleh hujan turun dua hari dua malam. Akibatnya, penduduk di Jalan Sabang dan sekitarnya banyak yang tinggal di atap-atap rumah menunggu air surut.

Sampai 1970-an, Jalan Sabang, termasuk Jalan Thamrin, sering dilanda banjir hingga air masuk ke toko-toko. Tapi, karena perjalanan Presiden Soeharto dari Jalan Cendana ke Istana kerap terganggu maka banjir di daerah ini diselamatkan melalui Pintu Air Manggarai. Meskipun, akibatnya ma-

● Kanal banjir timur

syarakat yang akhirnya terkena banjir.

Menyadari Batavia sering dilanda banjir, pemerintah kolonial Belanda menugaskan para lurah yang ketika itu disebut *wijkmester* atau bek agar betul-betul mengawasi kebersihan sungai. Yang tepergok membuang sampah di sungai akan mendapat sanksi hukum.

Pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan perintah agar semua kali buatan dan kanal di Batavia dibersihkan dari penduduk yang tinggal di bantaranya. Seharusnya Belanda bertindak tegas terhadap mereka yang tinggal di bantaran sungai, namun se-

Jika ingin bertanya kepada Abah Alwi mengenai sejarah Jakarta, Anda dapat mengirimkan pertanyaan ke:
info_anda_republika@yahoo.com

jak lama dibiarkan karena bisa mengganggu stabilitas dan menimbulkan perlawanan. Mengapa kita membiarkan saja warga membuang sampah di sungai? Semua juga tahu, bila kita mau meredakan banjir, baik banjir kiriman maupun banjir setempat, upaya pemeliharaan sungai sangat diperlukan. ■